

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN MABA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

(Suatu Studi Di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur)

Oleh

Maeldrik Damaskus Laleno

ABSTRAK

Semangat dan kemampuan disetiap daerah di Indonesia untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya buatan (infrastruktur). Ada daerah yang berlimpah dalam hal sumber daya alam tapi kurang dalam hal sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga dengan sumber daya buatan seperti infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial perekonomian yang mempengaruhi perilaku masyarakat daerah, keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan terjadi kesenjangan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Semakin berkembang dan meluasnya kesenjangan di Indonesia sampai saat ini menjadi salah satu masalah pembangunan di daerah/wilayah yang belum diselesaikan secara baik, karena saat ini kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar kelompok maupun antar daerah masih selalu terjadi sehingga ketidakseimbangan pertumbuhan pembangunan inilah akhirnya menimbulkan masalah dalam konteks makro, sehingga mengakibatkan suatu kondisi yang tidak stabil di pandang dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Kecamatan Maba Utara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (MENEK PDT) Nomor 082/KEP/M-PDT/III/2007 menetapkan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah tertinggal bersama dengan beberapa kabupaten lainnya di Indonesia. Mencermati hasil analisis kesenjangan pembangunan di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, yang di tinjau dari aspek potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur di tuntut melakukan berbagai kajian dan penanganan guna mengurangi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tertentu (kecamatan)

Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah dan Pembangunan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Setelah memasuki di era reformasi daerah – daerah di Indonesia telah membawa beberapa perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah dikeluarkannya peraturan pelaksanaan otonomi daerah (UU No 32

Tahun 2004) sebagai konsekuensi dari tuntutan pemerataan pembangunan daerah hingga pada tingkat kabupaten/kota. Penerapan otonomi daerah ini membagi dan menetapkan berbagai kewenangan tertentu antara pusat dan daerah dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah, perubahan dalam sistem ketatanegaraan telah melahirkan warna baru baik itu dampak positif maupun negatif yang ditimbulkannya.

Berkaca pada hal di atas, maka Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dari pusat sampai ke daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 150 bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Artinya perencanaan yang dibuat oleh daerah otonom harus mengacu pada perencanaan pembangunan nasional.

Semangat dan kemampuan disetiap daerah di Indonesia untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ada daerah yang berlimpah dalam hal sumber daya alam tapi kurang dalam hal sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga dengan juga pembangunan seperti infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial perekonomian yang mempengaruhi perilaku masyarakat daerah, keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan terjadi kesenjangan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur” ?

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk :*“Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur”*

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Kebijakan

Stoner James (1994:115-116), Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan. Kebijakan menetapkan batas-batas di sekitar keputusan, termasuk keputusan yang dapat di buat dan menolak keputusan-keputusan yang tidak dapat di buat. Dengan cara ini kebijakan menyalurkan dari anggota organisasi sehingga pemikir itu sejalan dengan tujuan organisasi.

James Danerson(1986:207), Mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pola tingkahlakuyang terarah kepada tujuan dan di ikuti seseorang atau beberapa orang dalam menangani suatu masalah, Kebijakan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan dari pertama tujuan-tujuan yang di pilih oleh aktor-aktor untuk dirinya sendiri atau suatu kelompok, kedua jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih mereka dan saat-saat yang mereka pilih. Kebijaksanaan sebagai suatu pengawasan sosial terorganisir, kebijaksanaan sebagai keputusan-keputusan dan perbuatan- perbuatan yang berhubungan dari suatu actor terhadap suatu masalah atau suatu kelompok.

Said Zainal Abidin menyatakan bahwa kebijakan dapat di bedakan dalam tiga tingkatan yaitu

1. Kebijakan umum yaitu : kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan yaitu : kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum,
3. Kebijakan teknis yaitu : kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan

B. Konsep Pemerintah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian pemerintah itu sendiri. Istilah pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Arti kata-kata tersebut menurut Poerwardarminta, Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu (Poerwa Darminta, 1976:739).

Mengenai pengertian pemerintah, Bayu Suryaningrat menyatakan bahwa pemerintah dapat diartikan sebagai badan yang tertinggi memerintah sesuatu negara, sedangkan pengertian pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah (Suryaningrat, 1979:2).

Pemerintah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya. Pemerintah itu adalah suatu badan/lembaga negara (statis). Sedangkan yang dilakukan pemerintah (dinamis) secara umum yang dimaksud dengan pemerintah adalah bagaimana caranya mengendalikan suatu negara didalam usahanya untuk mencapai tujuan negara (Wagio, 1991:1).

C. Konsep Pembangunan

Istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun” sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti,; *Pertama* : sadar atau siuman, *Kedua*: bangkit atau berdiri, *Ketiga*: bentuk, *Keempat*: membuat atau mendirikan, *kelima*: mengisi atau membina. Terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep pembangunan, konsep itu antara lain : pengembangan, pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, pembubaran, reformasi dan penemuan. Setiap konsep itu menunjukkan salah satu sisi atau nilai pembangunan. (Taliziduhu Ndraha).

Siagian (1994:2-3) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat

se wajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, /atau bidang pada obyeknya. (Nawawi 1994 :104-106).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur”. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan fakta empirik yang di peroleh di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Kecamatan Maba Utara

Secara umum pemerintah daerah sudah meletakkan dasar pembangunan daerah dan itu dimuat dalam visi dan misi bupati dan wakil bupati. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang selama ini berlangsung ada prioritas pembangunan yang di lakukan yakni masing-masing di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Setelah di lakukan penelitian peneliti menemukan kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, dan ada beberapa program yang di laksanakan oleh pemerintah daerah yang ada di kecamatan maba utara yang mana program – program tersebut merupakan merupakan program-program dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang anggarannya jelas bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dan dana dekonsentrasi. Pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur melaksanakan kebijakan tersebut dan melanjutkan program-program yang di buat oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Maluku utara atau menjadi perpanjangan tangan dari pelaksanaan program-program yang ada, sehingga kebijakan dan program-program dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Maluku utara itulah yang menjadi kebijakan pemerintah daerah yang seterusnya di laksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Maba Utara.

Secara rinci dapat dilihat program-program tersebut di antaranya :

- A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur No 21 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
- B. Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) dari pemerintah pusat dan Program pengembangan kecamatan

- C. Pembangunan infrastruktur menyangkut dengan infrastruktur pemerintahan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana yang telah diuraikan mulai dari bab 1 sampai bab IV sebelumnya maka dalam bab V ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari penulisan ini :

1. Wilayah kecamatan Maba Utara kalau dicermati bahwa menyangkut dengan pembangunan masih banyak mengalami ketertinggalan di bidang pembangunan infrastruktur masih sangat rendah dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan oleh faktor kepentingan politik, Sumber Daya Manusia, sumber alam dan pembangunan infrastruktur dalam hal ini sarana pendidikan, kesehatan dan sarana komunikasi dan kemampuan para pegawai yang masih sangat rendah
2. Belum ditemukannya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang strategis yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam bidang pembangunan, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan ,kecuali kebijakan dan program pemerintah pusat. Pemerintah kecamatan yang secara umum adalah pemerintah daerah telah melaksanakan pembangunan baik yang di wujudkan melalui upaya-upaya dan usaha-usaha maupun program-program yang telah di rencanakan dan di tetapkan sebelumnya, yang tentunya untuk kepentingan daerahnya, kemudian di dalam penerapannya kepada masyarakat yang ada sebagai sasaran dari kebijakan yang berlansung selama ini masih diwarnai dengan kendala-kendala misalnya kondisi georafis Kecamatan Maba Utara yaitu sarana tranportasi baik itu darat maupun laut, jembatan, sarana pendidikan, saran kesehatan, dan sarana komunikasi yang belum memadai
3. Pemerintah daerah juga kurang serius dan kurang sungguh-sungguh serta minimnya panggilan hati nurani untuk untuk dapat melihat kesenjangan yang terjadi, sehingga mengakibatkan kebijakan tersebut tidak di rasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Maba Utara dalam hal pembangunan infrastruktur.

4. Kecamatan Maba Utara masih dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sumber daya alam serta pembangunan infrastruktur. Ada daerah yang berlimpah dalam hal sumber daya alam tapi kurang dalam hal sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga dengan dibidang pembangunan seperti infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial perekonomian yang mempengaruhi perilaku masyarakat daerah, keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan terjadi kesenjangan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Maba Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat di ajukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan melalui kebijakan –kebijakan yang telah dan akan di buat adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah harus pro masyarakat yang tentunya kebijakan tentang pembangunan yang di sesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan realitas masyarakat itu sendiri, penerapan kebijakan harus adil dan merata, bebas dan bersi dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seta menyentuan langsung kepada masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah harus sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Diharapkan langkah-langkah penanggulangan kesenjangan tetap mengarah pada program pemberdayaan baik sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Karena pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana potensi masyarakat berkembang. Tetapi diharapkan agar program ini tidak di politisir oleh pihak-pihak tertentu melainkan suatu kebijakan yang mengantar masyarakat Kecamatan Maba Utara pada kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiwijoyo S Sakti, 2011, Gubernur : Kedudukan, Peran, Dan Kewenangannya, Graham Ilmu, Jogyakarta.
- Hendrawan Sakti, 2011, Koki Skripsi, Araska, Jogyakarta.
- Hoogerwerf A, 1983, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta.
- James Danerson, 1986, Analisis Kebijakan Public, Terjemahan Nuhadjir, Yokyakarta.

Kuypers, 1973, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta.
Labolo Muhadam, 2010, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawaliipers, Jakarta.
Moleong Lexy J, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
Nugroho Rian, 2011, Public Polici, PT Elex Media Kompotinda, Jakarta.
Pasolong Harbani, 2012, Metode Penelitian Administrasi, Alvabeta, Bandung.
Poerwadarminta. 1985, Kamus Bahasa Indonesia.: PN. Balai Pustaka, Jakarta
Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Alvabeta, Bandung.
Suryaningrat, Bayu. 1979, Mengenal Ilmu Pemerintahan.: Iip, Jakarta
Stoner James, 1994, Pengantar Kebijakan Public, Editor Nashir Budiman,
CV Rajawali.
Said Zainal Ph. D, 2004, kebijakan public, yayasan pancur siwah: jakart
Siagian S,P, 1983, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Gunung Agung
Taliziduhu Ndraha, 2005, Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta.
——— 2010, Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru, Rineka Cipta, Jakarta. (Jilid 1)
——— 2011, Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru, Rineka Cipta, Jakarta. (Jilid 2)
Wagio, Yudi. 1991, Mengenal Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Karya Nusantara

Sumber-sumber lain

Adija Talib, tesis, Analisis Kesenjangan Wilayah, Sekolah Pascasarana Institut, Pertanian Bogor,
2010
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ,2007,
Visimedia